

# UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis Magister  
Program Magister Hukum  
Semester Genap 2017/2018

## **TINDAKAN *UPSTREAM ACQUISITION* PADA INDUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG BERDAMPAK RESTRUKTURISASI PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

NPM: 16105205  
Lie Ling Als Aiereen Lee

### **ABSTRAK**

Kewenangan induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindakan restrukturisasi pekerja Indonesia. Tindakan restrukturisasi ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang tidak mengatur tentang batasan wewenang dari induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Indonesia dan bukan berbadan hukum Indonesia dan jelas terjadi bentrokan dengan Pasal 151 ayat(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2b) Undang-Undang No.25 Tentang Penanaman Modal, dimana penanaman modal bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pekerja. Penelitian ini akan memakai 3 (tiga) teori yaitu teori perlindungan hukum (Philipus M.Hadjon), Teori Cita Hukum Pancasila (B.Arief Sidharta) dan teori hukum investasi dispense. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) dengan obyek penelitian landasan teoritis dan landasan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan memakai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terjadinya kekosongan hukum yang mengatur batasan-batasan wewenang dari induk perusahaan multinasional yang berada di wilayah Indonesia melakukan tindakan restrukturisasi perusahaan. Argumentasi peneliti adalah kekosongan atas perlindungan hukum atas pekerja Indonesia dari tindakan restrukturisasi pekerja dari induk perusahaan yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah harus membuat undang-undang untuk mengisi kekosongan tersebut dan pemerintah khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal berperan aktif melakukan pengawasan dan pembaharuan data perusahaan multinasional dari dalam dan luar negeri.

**Kata Kunci:** *Upstream Acquisition Berdampak Restructuring Pekerja*

